

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prosedur pemungutan pajak parkir, mekanisme pelaporan dan penyetoran, serta kendala yang dihadapi dan solusi yang diterapkan oleh PT Angkasa Pura Indonesia di Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis terhadap data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak parkir telah menggunakan sistem digital yang terintegrasi, dengan tingkat akurasi tinggi dalam pencatatan transaksi. Besaran pajak yang diterapkan sebesar 30% dari total pendapatan bruto parkir, yang disetorkan secara berkala ke kas daerah melalui sistem pelaporan digital. Praktik ini mencerminkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pajak daerah.

Mekanisme pelaporan dilakukan secara bulanan oleh tim keuangan dan diverifikasi oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang. Realisasi penerimaan pajak parkir hingga bulan Mei 2025 telah mencapai 42,5% dari target tahunan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem pemungutan dan pelaporan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meski demikian, masih terdapat kendala teknis seperti gangguan jaringan dan keterbatasan sumber daya manusia, yang telah diantisipasi melalui prosedur pencatatan manual dan pelatihan petugas. Secara keseluruhan, implementasi sistem pemungutan pajak parkir di lokasi penelitian telah mencerminkan penerapan kebijakan fiskal yang adaptif terhadap digitalisasi, namun tetap memerlukan penguatan dari sisi regulasi, infrastruktur, dan kapasitas sumber daya manusia.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk mendukung peningkatan kualitas sistem pemungutan pajak parkir:

1. Pemerintah daerah sebaiknya melakukan harmonisasi regulasi agar praktik pemungutan pajak parkir yang menggunakan tarif 30% memperoleh dasar hukum yang eksplisit, guna menghindari ketidaksesuaian dengan ketentuan dalam peraturan daerah.
2. Peningkatan infrastruktur digital dan jaringan internet menjadi kebutuhan penting agar sistem e-parking dapat berfungsi secara optimal tanpa gangguan teknis yang berulang.
3. Pelatihan rutin bagi petugas operasional dan keuangan perlu ditingkatkan, khususnya dalam memahami penggunaan sistem digital dan peraturan perpajakan daerah yang berlaku.
4. Pemerintah daerah dan pengelola parkir perlu mendorong integrasi data secara langsung antara sistem internal dengan dashboard milik Bapenda guna meningkatkan transparansi dan mempercepat proses validasi laporan.